

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019 - 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Otto Iskandardinata, Lingkar Selatan - Benteng Ciamis
Telp./Fax 0265 7578862 Ciamis 46217
dishub.ciamiskab.go.id - email : dishubciamis2017@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Perubahan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berpedoman pada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif .

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024, dan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan RI tahun 2015-2019, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Ciamis.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renstra ini masih belum sempurna, maka apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan dapat dilakukan perubahan.

Ciamis, 21 Maret 2022
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ACHMAD YANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751118 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	7
2.1 Tugas, Fungsi Dan Sutruktur Organisasi Dinas Perhubungan	7
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	19
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	19
2.2.2 Asset/Modal.....	23
2.3.3 Unit Usaha yang Masih Operasional	26
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	27
2.3.1 Kinerja Pelayanan Dishub Kabupaten Ciamis.....	27
2.3.2 Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	34
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.....	38
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perhubungan.....	41
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	42
3.2.1 Visi.....	42
3.2.2 Misi.....	43
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.....	47

	3.3.1	Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.....	47
	3.3.2	Telaahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.....	50
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup.....	52
	3.5	Penentuan Isu Strategis.....	63
BAB 4		TUJUAN DAN SASARAN	65
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	65
BAB 5		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
	5.1	Strategi.....	69
	5.2	Kebijakan.....	69
BAB 6		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	71
BAB 7		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN	88
BAB 8		PENUTUP	98

DAFTAR TABEL	Halaman
TABEL 2.2 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Formal	20
TABEL 2.3 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan	20
TABEL 2.4 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian	21
TABEL 2.5 : Jumlah Jabatan Struktural Tahun 2020 Periode Bulan Desember..	21
TABEL 2.6 : Jumlah Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2020	21
TABEL 2.7 : Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Perhubungan Tahun 2020.....	22
TABEL 2.8 : Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop ...	23
TABEL 2.9 : Jumlah Perlengkapan Kantor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis	25
TABEL 2.10 : Jumlah Peralatan Kantor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis	26
TABEL 2.11 : Data Terminal Angkutan Jalan di Kabupaten Ciamis	26
TABEL 2.12 : Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang Sudah Dipasang.....	29
TABEL 2.13 : Lokasi Kegiatan Pengadaan Traffic Light	29
TABEL 2.14 : Perbandingan Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Dipelihara...	30
TABEL 2.15 : Perbandingan Jumlah Halte.....	30
TABEL 2.16 : Lokasi Halte/Shelter	30
TABEL 2.17 : Perbandingan Jumlah Alat Uji yang berfungsi.....	32
TABEL 2.18 : Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2018	33
TABEL 2.19 : Jumlah Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	34
TABEL 2.20 : Data Perkembangan Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah...	34
TABEL 2.21 : Perbandingan Jumlah Alokasi Anggaran Selama 5 Tahun Terakhir	34
TABEL 2.22 : Perkembangan Capaian Realisasi Keuangan Selama 5 Tahun Terakhir.....	35
TABEL 2.23 : Rasio Realisasi Anggaran dan Pendapatan Terhadap Target	36
TABEL 2.24 : Jumlah Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi Keuangan Selama 5 Tahun Terakhir	37
TABEL 3.1 : Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	41

TABEL 3.2	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	46
TABEL 3.3	: Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah	54
TABEL 4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.....	67
TABEL 5.1	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan terhadap Visi Misi RPJMD	69
TABEL 6.1	: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif Tahun 2019-2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis	77
TABEL 7.1	: Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.....	88
TABEL 7.2	: Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.....	90
TABEL 7.3	: Target Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	93

GAMBAR 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis 19

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis merupakan dokumen perencanaan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis meliputi : (1) Persiapan penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Renstra, (3) Penyusunan rancangan akhir Renstra dan (4) penetapan Renstra.

Penyusunan Perubahan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 dengan memperhatikan PM Nomor 80 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039, dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Ciamis.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2019-2024. Selain itu Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2021 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan;
31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Penarikan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terhutang.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perhubungan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Perhubungan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang perhubungan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten

Ciamis, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan R.I, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

- Bab IV Tujuan dan Sasaran,
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tahun 2019- 2024.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- Bab VIII Penutup
Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dan rencana tindak lanjut.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mempunyai tugas pokok "membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya"

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan rincian tugas dari masing- masing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 tahun 2016 Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai

tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang perhubungan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahkan :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program, informasi dan penatalaksanaan hubungan masyarakat serta pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan di lingkungan Dinas. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - h. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - k. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
 - l. pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;

- n. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- o. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- q. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
- e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset/barang milik daerah lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan umum dan terminal.

Bidang Angkutan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang angkutan;
- b. perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum;
- c. perencanaan dan penyusunan jaringan trayek angkutan umum.
- d. penyelenggaraan izin angkutan umum;
- e. penyusunan dan evaluasi tarif angkutan umum dan terminal;
- f. penyusunan petunjuk teknis penetapan jenis kendaraan angkutan umum dan batasan maksimum berat kendaraan angkutan umum beserta muatannya pada ruas jalan kabupaten;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahkan:

1) Seksi Bina Usaha Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan. Seksi Bina Usaha Angkutan sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan, penyiapan angkutan Umum.

Seksi Bina Usaha Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan izin usaha angkutan umum dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek angkutan umum;

- b. penyelenggaraan pelayanan izin trayek angkutan pedesaan, angkutan kota, angkutan perbatasan dan angkutan khusus yang beroperasi di daerah;
 - c. penyusunan rencana penetapan tarif Angkutan Umum dan Jasa Terminal yang diusahakan oleh pemerintah daerah;
 - d. penyelenggaraan pelayanan izin insidentil dalam trayek;
 - e. pelayanan izin operasi angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan lingkungan dan angkutan berbasis aplikasi yang beroperasi di daerah;
 - f. fasilitasi pembinaan perusahaan angkutan yang berdomisili di daerah;
 - g. penyusunan pertimbangan teknis/advis teknis permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan angkutan dan penggantian kendaraan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan khusus yang berdomisili di daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Jaringan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan. Seksi Jaringan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan dan penyiapan jaringan trayek serta perhitungan kebutuhan dan jenis moda angkutan. Seksi Jaringan Transportasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan lokasi terminal penumpang Tipe C;
 - b. fasilitasi pembangunan terminal Penumpang Tipe A, B dan C dan terminal angkutan barang;
 - c. penyusunan jaringan trayek dan alokasi kebutuhan angkutan dalam daerah;
 - d. fasilitasi dan pengoperasian pembangunan terminal angkutan barang;

- e. penyusunan pertimbangan teknis/advis teknis izin trayek Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan khusus asal dan/atau tujuan trayek wilayah dalam daerah;
- f. penyusunan dan perencanaan penetapan jaringan lintas angkutan jalan kabupaten (Barang dan Orang);
- g. penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten;
- h. penyusunan perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan fasilitasi perizinan angkutan sungai, danau, pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah kabupaten;
- i. perencanaan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan angkutan Umum tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- j. fasilitasi perizinan dan penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- k. fasilitasi penyusunan rencana induk dan penyelenggaraan kereta api khusus dalam daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- m. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang lalu lintas;
- b. penyusunan rencana penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan fasilitas lalu lintas dan pendukung jalan;
- d. pelaksanaan fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas, perairan, perkeretaapian dalam kabupaten;
- e. pelaksanaan penetapan dan pengaturan sistem informasi lalu lintas;
- f. perencanaan dan pelaksanaan penetapan kecepatan maksimum kendaraan;
- g. penyelenggaraan rekomendasi teknis analisa dampak lalu Lintas;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahkan :

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas;
- b. penyusunan bahan penetapan lokasi dan penyediaan Perlengkapan lalu lintas;
- c. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perairan, perkeretaapian dalam kabupaten;
- d. penyelenggaraan rekomendasi teknis penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas;
- e. penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di wilayah daerah;
- f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi/izin penataan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum serta penyelenggaraan tempat parkir khusus bongkar muat;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis lalu lintas;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;

- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lalu lintas jalan dan angkutan.

Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan perizinan angkutan umum dan angkutan barang;
- c. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan lalu lintas;
- d. fasilitasi pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan bidang perhubungan
- e. pelaksanaan pengawasan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik sarana, Prasarana perhubungan, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta perbengkelan kendaraan bermotor.

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang teknik sarana, Prasarana dan keselamatan;
- b. penyelenggaraan pembinaan pengoperasian terminal, stasiun kereta api dan pengujian kendaraan bermotor.
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di bidang teknik sarana, Prasarana dan keselamatan;
- d. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- e. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan operasionalisasi fasilitas pendukung dan penyelenggaraan pelabuhan dan bandar udara;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis membawahi :

- 1) Seksi Teknik Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan. Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan teknis sarana dan Prasarana perhubungan.

Seksi Teknik Sarana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebutuhan teknis, pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana perhubungan;
- b. fasilitasi penyelenggaraan terminal angkutan barang dan penumpang;
- c. penyusunan rencana prototipe dan jenis angkutan umum;
- d. penyusunan rencana rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. penyelenggaraan perizinan pembuatan tempat penimbunan kayu, jaring terapung dan keramba di sungai dan danau;

- f. penyelenggaraan perizinan usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
 - g. penyusunan rekomendasi rencana induk Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) dan fasilitasi perizinan pelabuhan sungai, Danau dan Penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan nasional;
 - h. fasilitasi pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
 - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Teknik Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan. Seksi Teknik Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis dan pelayanan umum, pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
- Seksi Teknik Keselamatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana di bidang teknik keselamatan;
 - b. penyusunan laporan dan analisis data kecelakaan lalu lintas;
 - c. penyusunan data daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - d. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan dalam Daerah ;
 - e. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
 - f. Penyusunan materi bimbingan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas;
 - g. pelaksanaan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis pada pengguna dan penyedia jasa angkutan;
 - h. pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pemberian rekomendasi izin sekolah pengemudi;

- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

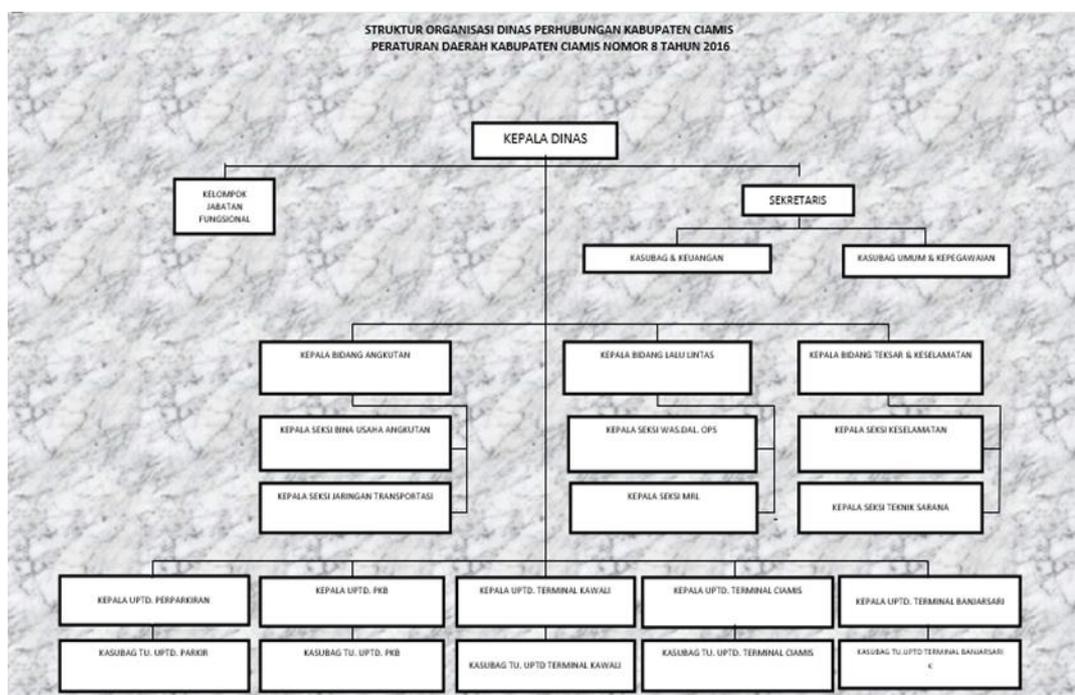
Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- d. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi dari uraian tugas masing-masing unit yang telah dijelaskan seperti diatas yaitu :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis



2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Setiap organisasi tidak terlepas dari unsur manusia sebagai pelaksananya. Pentingnya arti sumber daya manusia adalah mengingat pada bidang tugas yang akan dilaksanakannya. Prinsip *the right man on the right job* sangat diperlukan untuk menciptakan kehandalan dan profesionalisme pegawai. Kualitas sumber daya manusia terkait erat dengan tingkat pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan formal ditempuh melalui pendidikan sekolah-sekolah, sedangkan non formal ditempuh melalui pendidikan penjenjangan dan kursus-kursus/ diklat teknis bidang Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 71 PNS, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

a) Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan Formal

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)
1	S-3	-
2	S-2	4
3	S-1/D.IV	20
4	DIII/Akademi	1
5	DII	2
6	DI	-
7	SMA Sederajat	39
8	SMP Sederajat	2
9	SD Sederajat	3
Jumlah		71

b) Sumber Daya Manusia Menurut Pangkat Dan Golongan

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	PROSENTASI (%)
1	Pembina/Gol.IV	8	10,00
2	Penata/Gol.III	25	36,00
3	Pengatur/ Gol. II	36	51,00
4	Juru/ Gol. I	2	3,00
JUMLAH		71	100,00

c) Sumber Daya Manusia Menurut Status Kepegawaian

Tabel 2.4
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	PNS	71
2	NON PNS	151
Jumlah		222

d) Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan Struktural

Untuk periode Bulan Desember Tahun 2020 jumlah jabatan struktural yang ada sebanyak 23 orang dan yang terisi 23 orang, yakni :

Tabel 2.5
Jumlah Jabatan Struktural Tahun 2020 Periode Bulan Desember

NO	JABATAN STRUKTURAL	ADA	TERISI	KETERANGAN
1	ESELON II.B	1	1	Kepala Dinas
2	ESELON III.A	1	1	Sekretaris Dinas
3	ESELON III.B	3	3	Kepala Bidang
4	ESELON IV.A	13	13	Kasi/Kasubag/Ka.UPTD
5	ESELON IV.B	5	5	Kasubag UPTD
JUMLAH		23	23	

e) Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan Fungsional

Di Dinas Perhubungan juga terdapat jabatan fungsional yaitu penguji kendaraan bermotor dan ada 2 (dua) orang yang menjabat sebagai fungsional penguji kendaraan bermotor, dengan rincian :

Tabel 2.6
Jumlah Penguji Kendaraan Bermotor
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2020

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Penguji Penyelia	1
2.	Penguji Pelaksana Pemula	1
Jumlah		2

f) Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Perhubungan
Tahun 2020

NO	DIKLAT TEKNIS PERHUBUNGAN	JUMLAH (ORANG)
1.	PPNS	2
2.	Penguji Kendaraan Bermotor	3
3.	Bimtek Penilai Andalalin	1
4.	Operasional Terminal	30
5.	Penyusunan Program Penyuluhan Keselamatan Transportasi Jalan	30
	Jumlah	66

Dari kelima diklat teknis perhubungan tersebut diatas penyelenggaranya sebagian besar dari Kementerian Perhubungan melalui Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi dan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal.

Selain diklat teknis perhubungan juga ada beberapa pegawai yang telah mengikuti diklat, bimtek atau workshop yang diselenggarakan dari instansi lain maupun dari lembaga pendidikan lainnya :

Dengan jumlah pegawai yang ada, banyak pegawai yang masih belum bisa mengikuti kesempatan untuk mengikuti baik diklat, bimtek maupun workshop karena keterbatasan kompetensi pendidikan minimal sebagai syarat untuk mengikuti diklat dimaksud. Meski demikian dinas tetap berupaya untuk selalu memberi motivasi dan berusaha mengajukan usulan kepada kementerian perhubungan terkait penyelenggaraan *in house training* di Kabupaten Ciamis.

g) Daftar Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop

Tabel 2.8
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop

No	Diklat/Bimtek/Workshop	Jumlah (orang)	Penyelenggara
1.	PPD RPJMD	2	BAPPENAS
2.	Penyusunan LAKIP	2	Bagian Organisasi Setda Kab.Ciamis
3.	Pengadaan Barang Dan Jasa	2	UNSOED
4.	Aplikasi SIPKD	2	BPKD
5.	Monevis	1	Bagian Pembangunan Setda Kab. Ciamis
6.	e-Planning	2	BAPPEDA
7.	Akrual Basic	1	BPKD
	Jumlah	12	

2.2.2 Asset/Modal

a) Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas jabatan pada Dinas Perhubungan tahun 2020 sebanyak 9 (sembilan) unit yang terdiri dari kendaraan roda 4. Jumlah kendaraan dinas jabatan dibandingkan tahun 2018, mengalami perubahan (bertambah).

Kendaraan operasional tahun 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) unit yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) unit kendaraan roda 2, 9 (sembilan) unit kendaraan roda 4, 2 (dua) unit kendaraan roda 6.

b) Gedung Kantor

Kantor Dinas Perhubungan saat ini menempati bangunan yang memang sudah disediakan untuk kantor Dinas Perhubungan dengan lokasi ideal berdekatan dengan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan gedung kantor lainnya berupa terminal yaitu :

- Gedung Kantor UPTD Terminal Ciamis dan UPTD Pengelolaan Parkir serta bangunan Terminal Ciamis yang terletak di Jl. Letnan Samuji Ciamis;

- Gedung Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang terletak di Komplek Dinas Perhubungan Jl. Otto Iskandardinata Lingkar Selatan-Benteng Ciamis;
- Bangunan Terminal Banjarsari terletak di Komplek Pasar Banjarsari
- Bangunan Terminal Sindangkasih yang terletak di Komplek Pasar Sindangkasih;
- Gedung kantor dan bangunan Terminal Pamokolan Jalan Raya Cihaurbeuti;
- Gedung kantor dan bangunan Terminal Panumbangan terletak di Jalan Raya Panumbangan-Panjalu;
- Bangunan Terminal Panjalu terletak di kompleks pasar Panjalu;
- Gedung kantor dan bangunan Terminal Cisaga terletak di Komplek Pasar Cisaga Jalan Raya Banjar – Ciamis;
- Gedung kantor dan bangunan Terminal Cibeureum terletak di Jalan Cibeureum- Sukamantri;
- Bangunan Terminal Cimaragas terletak di Jalan Raya Cimaragas – Banjar;
- Gedung Kantor dan bangunan Terminal Kawali terletak di Komplek Pasar Kawali;
- Gedung Kantor dan bangunan Terminal Rancah terletak di kompleks pasar Rancah.
- Gedung kantor dan bangunan Terminal Pamarican

c) Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor yang ada perlu diperbaharui, mengingat ada beberapa meja dan kursi yang rusak berat. Namun sebagian besar masih dalam kategori cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kerja pegawai. Dibawai ini kami sajikan jenis perlengkapan kantor yang ada dengan kondisinya .

Tabel 2.9
Jumlah Perlengkapan Kantor Pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
1	Brankas	2	1	1
2	Mesin Absensi	1	1	0
3	Kursi Besi/Material	3	3	0
4	Meja Kayu	3	3	0
5	Sice	4	4	0
6	Meja Rapat	14	14	0
7	Meja Tulis	42	28	14
8	Kursi Rapat	47	32	15
9	Kursi Tamu	2	2	0
10	Kursi Putar	21	15	6
11	Kursi Lipat	69	47	22
12	Meja Komputer	4	4	0
13	Sofa	3	3	0
14	Kursi Kerja	7	7	0
15	Mesin Potong Rumput	2	0	2
16	Tempat Sampah	3	3	0
17	Lemari Es	2	2	0
18	AC	13	11	2
19	Alat Pendingin (AC Split)	4	4	0
20	Kipas Angin	12	7	5
21	Kompor Gas	1	1	0
22	Tabung Gas	1	1	0
23	Dispenser	4	3	1
24	Microphone	2	2	0
25	Microphone Table Stand	11	4	7
26	Microphone/Wireless Mic	5	3	2
27	Stand Microphone	2	2	0
28	Tangga Aluminium	2	0	2
29	Mesin Jilid	1	0	1
30	Faximil	1	1	0
31	Screen	1	1	0
32	Mimbar pidato	1	1	0

Sumber dari Aset Barang Dinas Perhubungan Tahun 2020

Dari jumlah perlengkapan kantor tersebut tentunya perlu adanya penambahan perlengkapan kantor lainnya seperti genset, mengingat kantor Dinas Perhubungan memiliki daya listrik yang tinggi serta perlunya meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

d) Peralatan Kantor

Peralatan kantor yang ada sementara cukup memadai namun perlu adanya peningkatan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dibawah ini peralatan kantor yang menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab para pegawai seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Peralatan Kantor Pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
1	Kursi Kerja Pegawai	30	26	4
2	Kursi Kerja Pejabat	33	23	10
3	Meja Kerja	16	16	0
4	Meja Biro	45	31	14
5	Lemari Besi	15	11	4
6	Filling Besi/Metal	13	10	3
7	Lemari Kaca	4	4	0
8	Lemari Kayu	6	4	2
9	PC Unit/Komputer PC	101	88	13
10	Laptop	33	30	3
11	Printer	34	24	10
12	Proyektor+attachment	3	2	1
13	Camera	4	4	0
14	Mesin Foto Copy	6	6	0

Sumber dari Aset Barang Dinas Perhubungan Tahun 2020

2.2.3 Unit Usaha Yang Masih Operasional

a) Terminal

Fasilitas perhubungan di Kabupaten Ciamis terdiri dari terminal dan halte. Jumlah lokasi terminal dan halte di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Data Terminal Angkutan Jalan Di Kabupaten Ciamis

NO	NAMA TERMINAL	TIPE	LOKASI	KONDISI
1	Terminal Ciamis	C	Kec. Ciamis	Baik
2	Terminal Cisaga	C	Kec. Cisaga	Baik

NO	NAMA TERMINAL	TIPE	LOKASI	KONDISI
3	Terminal Cimaragas	C	Kec. Cimaragas	Tidak Ada
4	Terminal Sindangkasih	C	Kec. Sindangkasih	Baik
5	Terminal Pamokolan	C	Kec. Cihaurbeuti	Baik
6	Terminal Panumbangan	C	Kec. Panumbangan	Baik
7	Terminal Kawali	C	Kec. Kawali	Baik
8	Terminal Rancah	C	Kec. Rancah	Baik
9	Terminal Panjalu	C	Kec. Panjalu	Masih menggunakan lahan parkir pasar Panjalu
10	Terminal Cibeureum	C	Kec. Sukamantri	Perlu penertiban operasional Terminal
11	Terminal Banjarsari	C	Kec. Banjarsari	Perlu revitalisasi
12	Terminal Pamarican	C	Kec. Pamarican	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

2.3.1 Kinerja Pelayanan Bidang Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, melaksanakan kampanye keselamatan jalan, menyelenggarakan pelayanan perizinan angkutan penumpang umum, menyelenggarakan pelayanan di terminal dan melaksanakan pengawasan operasional kendaraan angkutan penumpang umum baik di ruas jalan maupun di terminal.

1. Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Ciamis dibagi menjadi 5 kelompok pelayanan, yaitu :

- Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebanyak 434 unit, meskipun Kabupaten Ciamis bukan sebagai titik simpul perjalanan trayek AKAP, namun banyak kendaraan angkutan penumpang umum trayek AKAP baik bus sedang maupun bus besar route trayeknya melewati Kabupaten Ciamis. Ini dikarenakan jalan nasional di Kabupaten Ciamis merupakan jalur utama di bagian selatan pulau Jawa.
- Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) ada sebanyak 520 unit, terdiri dari bus besar 17 unit bus sedang 57 unit dan bus kecil 446. Untuk trayek AKDP Kabupaten Ciamis sebagai simpul perjalanan kendaraan angkutan penumpang dari dan ke Ciamis.
- Angkutan Kota ada sebanyak 354 unit yang melayani wilayah Ciamis kota terdiri dari 13 jaringan trayek.
- Angkutan Perdesaan ada sebanyak 271 unit yang melayani wilayah perdesaan di Kabupaten Ciamis terdiri dari 19 jaringan trayek.
- Angkutan Perbatasan ada sebanyak 358 unit yang melayani Kabupaten Ciamis dengan beberapa daerah perbatasan terdiri dari 23 jaringan trayek.

2. Rambu-Rambu Lalu Lintas

Hasil capaian dari tahun awal capaian renstra tingkat capaiannya tiap tahun mengalami peningkatan selain karena memang adanya kegiatan penambahan fasilitas keselamatan baik yang didanai oleh APBD Kabupaten juga adanya tenaga teknis dari Kementerian Perhubungan. Capaiannya dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 2.11 dibawah ini :

Tabel 2.12

Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas Yang Sudah Dipasang

No	Uraian	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Realisasi								
1	Pemasangan rambu-rambu	Unit	361	396	411	512	461	650	817	797	80	850

Sumber dari Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tahun 2020

3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)

Tabel 2.13

Lokasi Kegiatan Pengadaan Traffic Light

NO	Lokasi	Volume	Status Jalan
1	Simpang 4 Sudirman	1 Simpang	Nasional
2	Simpang 4 Juanda	1 Simpang	Nasional
3	Simpang 3 Ahmad Yani	1 Simpang	Nasional
4	Simpang 4 Yos Sudarso	1 Simpang	Nasional
5	Simpang 4 Rumah Sakit	1 Simpang	Nasional
6	Simpang 3 Alun-alun Ciamis	1 Simpang	Nasional
7	Simpang 3 Martadinata	1 Simpang	Nasional
8	Simpang 3 Pahlawan	1 Simpang	Nasional
9	Simpang 4 Tonjong	1 Simpang	Nasional
10	Simpang 4 Lokasana	1 Simpang	Nasional
11	Simpang 4 Cihaurbeuti	1 Simpang	Nasional
12	Simpang 3 Sindangkasih	1 Simpang	Nasional
13	Simpang 4 Cirahong	1 Simpang	Prioritas Provinsi

4. Penerangan Jalan Umum

Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara menurut laporan hasil pelaksanaan kegiatan terdapat 751 titik yang dipelihara dilokasi yang tersebar di seluruh kabupaten Ciamis. Rincian perbandingan

terhadap pemeliharaan penerangan jalan umum digambarkan pada tabel 2.13 dibawah ini :

Tabel 2.14

Perbandingan Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dipelihara

No	Uraian	Satuan	2018		2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	Unit	500	634	500	500	650	751

Sumber dari Bidang Teksar Dinas Perhubungan Tahun 2020

Capaian tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya, karena pekerjaan pemeliharaan penerangan jalan umum berdasarkan banyaknya laporan dari Desa dan Kecamatan didukung oleh ketersediaan Anggaran.

5. Halte/Shelter

Fasilitas prasarana halte yang ada selain dari APBD Kabupaten Ciamis juga dibangun oleh pihak swasta. Meski pada tahun 2020 realisasi tidak mencapai target pembangunan halte/shelter karena terdampak anggaran yang di rasionalisasi namun capaian indikator ini secara keseluruhan bertambah dari tahun sebelumnya sesuai pada tabel 2.14 dibawah ini :

Tabel 2.15

Perbandingan Jumlah Halte

No	Uraian	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Realisasi								
1	Halte/ Shelter	Lokasi	12	14	17	16	17	17	20	20	23	21

Sumber dari Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Tahun 2020

Dari capaian tersebut di atas dibawah ini lokasi halte/shelter seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.16

Lokasi Halte/Shelter

No	Ruas Jalan	Volume (Lokasi)	Lokasi
1	Jl.Jend. Sudirman	6	SDN 1 Sindangrasa

No	Ruas Jalan	Volume (Lokasi)	Lokasi
			SMP N 6 Ciamis
			SMP N 3 Ciamis
			SD N Janggala
			SMK N 1 Ciamis
			SMP N 5 Ciamis
2	Jl.Iwa K	1	Depan Organda
3	Jl. Pasar Shubuh	1	Pasar Shubuh
4	Jl. Ciptomangunkusumo	1	SD N 7 Ciamis
5	Jl.Tjokro	1	SD N 2 Ciamis
6	Jl. Ir. H. Juanda	2	Taman Lokasana
			Kancab BRI
7	Jl.Stasiun	2	Yogya Dept.Store
8	Jl.RE.Martadinata	1	Kampus UNIGAL
9	Jl. Yos Sudarso	1	Taman Yodas
10	Ruas Jalan Ciamis-Cirebon (Kawali)	1	Taman Surawisesa
11	Banjarsari	1	Masjid Agung
12	Ruas Jalan Cisaga	1	Desa Mekar Mukti
13	Ruas Jalan Cijeungjing	1	Desa Bojong
14	Jalan menuju ke Sukadana	1	Depan Puskesmas Baregbeg

Sumber dari Bidang Angkutan Tahun 2020

6. Alat Uji Kendaraan Bermotor

Adapun jenis alat uji yang digunakan untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor tersebut yaitu :

- 1) Alat uji rem statis
- 2) Alat uji portable
- 3) Alat uji timbangan statis
- 4) Alat uji kincup roda depan
- 5) Alat uji lampu utama
- 6) Alat uji emisi gas buang (CoHC)
- 7) Alat uji ketebalan asap (smoke tester)
- 8) Alat uji kecepatan
- 9) Alat uji kebisingan
- 10) Alat uji tekanan ban
- 11) Alat uji pengukur dimensi
- 12) Play detector.

Namun pada tahun 2020 alat uji yang berfungsi mengalami penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya karena salah satu alat uji jenis play detector mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik dan akan diajukan anggaran untuk pengadaan alat yang baru dan pemeliharaan/perbaikan pada Tahun Anggaran 2021. Dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.17
Perbandingan Jumlah Alat Uji Yang Berfungsi

No	Uraian	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Realisasi								
1	Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor yang Berfungsi dengan Baik	Unit	8	8	9	11	10	12	10	12	10	11

Sumber dari UPTD PKB Dinas Perhubungan Tahun 2020

7. Moda Kereta Api

Moda kereta api merupakan sarana transportasi massal yang dinilai memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan kendaraan moda jalan raya, keunggulan ini dilihat dari penggunaan ruang yang hemat, tingkat keselamatan tinggi, tidak macet, hemat energi, dan ramah lingkungan. Di Kabupaten Ciamis ada 2 (dua) stasiun yang memfasilitasi mobilisasi masyarakat menggunakan moda kereta api yaitu di stasiun Ciamis di Kecamatan Ciamis dan Stasiun Bojong di Kecamatan Cijeungjing. Meskipun jumlah pengguna moda kereta api relatif sedikit namun keberadaan moda kereta api di Kabupaten Ciamis cukup membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan.

Berdasarkan data diatas bahwa capaian kinerja pelayanan bidang perhubungan yang diukur dari target dan realisasi selama kurun waktu Tahun 2016-2020 yang dapat dilihat pada tabel 2.18 sebagai berikut ini:

Tabel 2.18
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Konektivitas Kabupaten		15,79		15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	100	100	100	100	100
	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan type C		67,37		67,37	67,37	67,37	67,37	67,37	67,37	67,37	67,37	67,37	67,37	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pelayanan uji berkala		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,42	95,03	96,71	109,95	99,38	101,42	95,03	96,71	109,95	99,38
	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten		25,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	21,52	23,53	26,11	27,49	29,76	86,08	94,12	104,44	109,96	119,04
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten		0,20		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,17	0,17	0,17	0,26	0,28	85,00	85,00	85,00	130,00	140,00
	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten (rambu)		25,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	17,55	18,89	20,61	22,79	25,54	70,20	75,56	82,44	91,16	102,16

2.3.2 Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun dibawah ini dapat dilihat target dan realisasi pengelolaan pendapatan asli daerah di sektor perhubungan.

Tabel 2.19

Jumlah Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)								
1	Pendapatan Asli Daerah	2.018.595.000	2.091.773.600	2.305.789.760	1.941.657.900	2.071.085.500	2.248.606.200	2.180.060.000	2.812.718.100	2.737.051.000	2.581.402.000

Dari tabel tersebut diatas dibawah ini adalah perkembangan capaian realisasi pendapatan asli daerah selama 5 tahun :

Tabel 2.20

Data Perkembangan Capaian Realisasi PAD

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Capaian Pendapatan Asli Daerah	103,63%	84,21%	108,57%	129,02%	94,31%

b) Belanja Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun perkembangan alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21

Perbandingan Jumlah Alokasi Anggaran Selama 5 Tahun Terakhir

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)								
1	Alokasi Anggaran	13.737.360.994	13.644.081.072	38.422.564.622	36.771.926.652	38.664.062.946	38.303.010.850	36.957.353.000	35.604.163.032	76.434.744.000	73.420.520.435

Dari tabel tersebut bahwa pada tahun 2020 secara keseluruhan total alokasi anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mendapatkan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar

Rp.42.990.000.000 untuk kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan, kegiatan Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, kegiatan Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas berbasis ATCS. Realisasi capaiannya untuk tahun 2020 baik belanja langsung maupun tidak langsung yaitu 96,06%.

Perkembangan capaian pengelolaan anggaran selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.22
Perkembangan Capaian Realisasi Keuangan Selama 5 Tahun

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Capaian Realisasi Keuangan	99,32%	95,70%	99,07%	96,34%	96,06%

Dari tabel tersebut di atas dapat dianalisis pada tahun 2017 yang paling rendah capaian realisasi keuangannya hal ini dikarenakan pada tahun tersebut penyerapan rekening listrik untuk pembayaran rekening penerangan jalan umum hanya bisa direalisasi sebesar sekitar 90,00%. Hal ini dikarenakan ada selisih perhitungan yang dilakukan antara pihak PLN dan Dinas, sehingga pada setiap perencanaan yang akan datang meskipun pembayaran listrik *lumpsum* harus di dukung akurasi data yang rasional. Sedangkan pada tahun 2020 serapan anggaran lebih rendah dari tahun 2019 karena adanya keterlambatan pembayaran pada kegiatan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.104.538.500 yang rencananya akan dibayarkan pada anggaran perubahan penjabaran Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.23
Rasio Realisasi Anggaran dan Pendapatan Terhadap Target

NO	URAIAN	RASIO REALISASI DAN ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	Pendapatan	96,50%	118,75%	92,11%	129,02%	94,31%
1	Pendapatan Daerah	96,50%	118,75%	92,11%	129,02%	94,31%
	Hasil Retribusi Daerah	96,50%	118,75%	92,11%	129,02%	94,31%
II	Belanja Dinas	99,32%	95,70%	99,07%	96,34%	96,06%
1	Belanja Tidak Langsung	99,72%	99,95%	99,07%	97,98%	95,17%
	Belanja Pegawai	99,72%	99,95%	99,07%	97,98%	95,17%
2	Belanja Langsung	98,76%	94,79%	99,06%	95,86%	96,06%
	Belanja Pegawai	99,85%	99,32%	99,28%	100%	98,60%
	Belanja Barang dan Jasa	98,66%	92,79%	99,17%	95,16%	89,63%
	Belanja Modal	98,34%	98,44%	98,82%	98,00%	99,23%

Tabel 2.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	2.018.595.000	2.305.789.760	2.071.085.500	2.180.060.000	2.737.051.000	2.091.773.600	1.941.657.900	2.248.606.200	2.812.718.100	2.581.402.000	1,04	0,84	1,09	1,29	0,94	8%	5%
Pendapatan Daerah	2.018.595.000	2.305.789.760	2.071.085.500	2.180.060.000	2.737.051.000	2.091.773.600	1.941.657.900	2.248.606.200	2.812.718.100	2.581.402.000	1,04	0,84	1,09	1,29	0,94	8%	5%
Hasil Retribusi Daerah	2.018.595.000	2.305.789.760	2.071.085.500	2.180.060.000	2.737.051.000	2.091.773.600	1.941.657.900	2.248.606.200	2.812.718.100	2.581.402.000	1,04	0,84	1,09	1,29	0,94	8%	5%
Belanja Dinas	13.737.360.994	38.422.564.622	38.664.062.946	36.957.353.000	76.434.744.000	13.644.081.072	36.771.926.652	38.303.010.850	35.604.163.032	73.420.520.435	0,99	0,96	0,99	0,96	0,96	54%	52%
Belanja Tidak Langsung	8.022.451.644	6.803.509.622	8.838.509.946	8.355.998.000	7.625.930.200	5.643.935.674	6.800.212.552	8.756.592.202	8.186.943.656	7.257.760.608	0,70	1,00	0,99	0,98	0,95	-1%	6%
Belanja Pegawai	8.022.451.644	6.803.509.622	8.838.509.946	8.355.998.000	7.625.930.200	5.643.935.674	6.800.212.552	8.756.592.202	8.186.943.656	7.257.760.608	0,70	1,00	0,99	0,98	0,95	-1%	6%
Belanja Langsung	5.714.909.350	31.619.055.000	29.825.553.000	28.601.355.000	68.808.813.800	5.643.935.674	29.971.714.100	29.546.418.648	27.417.219.376	66.162.759.827	0,99	0,95	0,99	0,96	0,96	86%	85%
Belanja Pegawai	870.060.000	618.070.000	181.480.000	317.500.000	535.400.000	868.735.000	613.882.500	180.180.000	317.500.000	527.900.000	1,00	0,99	0,99	1,00	0,99	-11%	-12%
Belanja Barang dan Jasa	3.406.119.350	20.515.205.200	20.460.500.650	21.737.781.600	22.022.313.475	3.360.327.747	19.035.233.000	20.291.133.398	20.684.683.872	19.739.611.387	0,99	0,93	0,99	0,95	0,90	59%	56%
Belanja Modal	1.438.730.000	10.485.779.800	9.183.572.350	6.546.073.400	46.251.100.325	1.414.872.927	10.322.598.600	9.075.105.250	6.415.035.504	45.895.248.440	0,98	0,98	0,99	0,98	0,99	138%	139%

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan yang dimiliki Dinas Perhubungan yang merupakan potensi yaitu :

- a) Kapasitas personil dinas yang cukup memadai yaitu sebanyak 222 aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai yang bestatus sebagai PNS maupun tenaga Non-PNS.
- b) Ketersediaan prasarana kerja seperti gedung kantor, gedung unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan terminal.
- c) Dukungan regulasi dalam menyelenggarakan urusan perhubungan didukung oleh Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan.
- d) Dukungan koordinasi terhadap instansi terkait yang kondusif sesuai Keputusan Bupati Ciamis Nomor 555/Kpts.Kpts-Huk 2012 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Kelemahan

- a) Dari jumlah aparatur sipil negara yang ada di Dinas Perhubungan, pegawai yang memiliki kualifikasi teknis bidang perhubungan masih minim terutama untuk tenaga teknis penguji kendaraan bermotor, perencana transportasi darat, tenaga teknis pengelola terminal, tenaga teknis pelayanan perizinan angkutan, tenaga teknisi K3 Listrik (pemasangan PJU), tenaga teknis PPNS, tenaga penilai andalalin, tenaga audit keselamatan jalan.
- b) Pemeliharaan prasarana dan sarana kerja yang belum memadai baik di gedung kantor utama maupun di unit pelaksana teknis dinas, serta kendaraan operasional dan/atau kendaraan survey.

3. Tantangan

- a) Menurunkan angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas.
- b) Kemajuan teknologi merupakan tantangan dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perhubungan diantaranya :
 - Penggunaan *smart card* atau BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - Penerapan angkutan yang terintegrasi secara system yang dilengkapi dengan aplikasi pelayanan terhadap pengguna angkutan umum.
 - Pengembangan/pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas berbasis *area traffic control system* (ATCS).
- c) Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup pesat setiap tahunnya.
- d) Fenomena beroperasinya angkutan umum dalam jaringan (angkutan *online*) dimana pelayanan angkutan konvensional belum optimal.
- e) Keberadaan angkutan penumpang umum illegal (tidak berijin) dan kendaraan ODOL (Over Dimensi Over Load)

4. Peluang

- a) Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam kampanye keselamatan lalu lintas baik melalui sosialisasi ke kabupaten/kota, pelaksanaan diklat dan bimtek serta pemberian media/alat peraga sosialisasi berupa leaflet, banner, helm keselamatan.
- b) Pemerintah Kabupaten Ciamis berkomitmen untuk menekan angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas melalui forum lalu lintas angkutan jalan.
- c) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara terintegrasi dan komputerisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan memberikan bantuan berupa komputer dan software pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

- d) Adanya kesempatan untuk mengusulkan kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan melalui dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Perhubungan dan bantuan keuangan provinsi Jawa Barat.
- e) Posisi strategis Kabupaten Ciamis setelah dibangunnya bandar udara internasional Kertajati di Majalengka dan jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasik-Cilacap.
- f) Mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan wilayah Jabar bagian selatan.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Urusan wajib non pelayanan dasar di bidang perhubungan terutama jasa transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena kebutuhan akan jasa transportasi merupakan kebutuhan turunan yang berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana, prasarana dan pelayanan bidang perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pergerakan orang dan barang yang dilakukan oleh masyarakat dalam menunjang aktifitas kegiatan sehari-hari.

Permasalahan bidang perhubungan secara umum dapat dilihat dalam tabel 3.1 yaitu :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih tingginya angka kecelakaan	Terdapat beberapa faktor, diantaranya; faktor jalan, perlengkapan jalan, kendaraan, lingkungan dan manusia (human error)	Jalan yang tidak memiliki rambu, jalan berlubang, minimnya marka jalan dan penerangan jalan umum serta kurangnya sosialisasi keselamatan jalan
2.	Penyelenggaraan parkir tepi jalan umum belum optimal	Perlunya penataan fasilitas parkir pada tepi jalan umum dan pusat kegiatan atau fasilitas umum lainnya	Parkir di tepi jalan umum masih banyak yang belum dikelola dengan baik sehingga memunculkan masalah kemacetan dan belum optimalnya target PAD dari pengelolaan parkir

3.	Semakin menurunnya daya tarik masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum	Belum optimalnya pelayanan angkutan penumpang umum di terminal	Prasarana dan sarana transportasi, sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran sopir akan pentingnya kelayakan kendaraan yang beroperasi.
		Menurunnya keinginan masyarakat menggunakan pelayanan angkutan umum	Ketersediaan angkutan umum, waktu tunggu di terminal yang lama dan kondisi kendaraan angkutan yang kurang layak dan laik, serta kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin mudah dan banyak
4.	Pentingnya integrasi angkutan umum	Belum maksimalnya operasional jaringan trayek	Jaringan trayek yang ada belum sepenuhnya terisi dan masih ada yang tidak beroperasi
5.	Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum dilengkapi dengan teknologi informasi secara <i>online</i>	Belum tersedianya perlengkapan dan peralatan penunjang pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi secara online

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dituangkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 yaitu “**Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua.**” Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut :

Mantapnya Kemandirian Ekonomi, bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan

pengangguran, peningkatan pendapatan *per kapita*, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

Sejahtera Untuk Semua, bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu Dengan **Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**.

3.2.2 Misi

Sedangkan yang menjadi misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan.

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah.

Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.

Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan

masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal.

Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi-potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah.

Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah

yang berkualitas dengan pematapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dinas perhubungan sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ciamis dalam RPJMD Tahun 2019-2024 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan maka yang menjadi fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait dengan pencapaian Misi 2 yaitu **“Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah”**.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan dengan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang dapat membantu pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	Mantapnya kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua		
Misi	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah		
Misi	Permasalahan Pelayanan DISHUB	Faktor	
		Penghambat	Pendorong/Potensi
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah	Belum maksimalnya peningkatan keselamatan jalan	Pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang	Dinas Perhubungan mempunyai program SABA Desa dan Sekolah serta komunitas SALUD
	Belum optimalnya penataan fasilitas parkir pada tepi jalan umum dan pusat kegiatan atau fasilitas umum lainnya	Banyaknya lahan parkir yang belum tertata dengan baik	Adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi penataan parkir untuk menunjang agar potensi PAD dapat meningkat
	Belum optimalnya pelayanan angkutan penumpang umum di Terminal	Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor semakin pesat dan banyaknya layanan angkutan online	Penataan pelayanan di terminal dan kendaraan angkutan penumpang umum yang layak dan laik
	Belum maksimalnya operasional jaringan trayek sehingga perlu dilakukan evaluasi	Jaringan trayek yang ada belum sepenuhnya terisi dan perlu pembaharuan dasar penetapan jaringan trayek	Surat Keputusan Bupati Nomor 551.21/Kpts.204-Huk/2005 tentang jaringan trayek perlu dilakukan evaluasi
	Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Pelayanan pengujian belum dilengkapi dengan teknologi informasi	Memaksimalkan terintegrasinya pelayanan PKB dengan system informasi dari Kementerian Perhubungan berupa BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik)
	Belum maksimalnya ketersediaan perlengkapan jalan.	Belum optimalnya pemasangan perlengkapan jalan di seluruh ruas jalan kabupaten	Kajian data kebutuhan perlengkapan jalan di seluruh ruas jalan kabupaten

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

Kebijakan umum dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi yang dituangkan dalam PM 80 Tahun 2020 meliputi sebagai berikut :

1. Terwujudnya konektivitas nasional
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi
3. Meningkatnya keselamatan transportasi
4. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum
5. Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten
6. Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan
7. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan baik

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 disebutkan bahwa sebagai Perwujudan Visi Presiden (Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong) dalam sektor transportasi yaitu dengan “**Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**”. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Konektivitas Nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara;

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman,

selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air;

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang profesional, mandiri, dan produktif, serta berdaya saing internasional,

Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*) serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

Misi Kementerian Perhubungan R.I.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 disebutkan misi Kementerian Perhubungan adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antara moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;

4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Presiden yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 – 2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2020 - 2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;

2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
 - a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
 - b. Capaian on time Performance (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
3. Meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Empat focus pembangunan sector perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sector unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Adapun beberapa isu yang mengemuka di bidang transportasi yang sampai dengan saat ini masih actual adalah:

1. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke *seamless transport*;
2. Buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota-kota di Indonesia tidak efisien, memiliki kondisi lingkungan udara yang tidak sehat, kehilangan daya saing dan tidak mampu mendorong investasi dan pertumbuhan;
3. Presentase pengguna angkutan umum perkotaan di Indonesia terus mengalami penurunan persentase;
4. Jumlah kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil yang meningkat antara lain dikarenakan adanya kemudahan dalam

- kepemilikan kendaraan bermotor yaitu melalui kemudahan dalam proses pembelian kendaraan bermotor secara kredit dan kondisi angkutan umum saat ini yang belum memadai;
5. Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha rendah dan menyebabkan rendahnya produktivitas nasional;
 6. Pemanfaatan energy baru dan terbarukan didalam penyelenggaraan transportasi;
 7. Masih kurangnya pengembangan dan pemanfaatan transportasi massal berbasis jalan rel sebagai alternative pergerakan orang dan barang;
 8. Pemisahan regulator dan operator pada transportasi udara masih belum sempurna karena adanya tumpang tindih kewenangan antara unit-unit organisasi;
 9. Mewujudkan pengembangan/ pembangunan prasarana Bandar udara di Jawa Barat sesuai pola jaringan prasarana dan pelayanan transportasi udara nasional, berdasarkan hirarki fungsi secara efisien dan efektif dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa transportasi udara di Jawa Barat.

Yang menjadi isu strategis bidang perhubungan di Jawa Barat adalah salah satunya yaitu rencana pengembangan jaringan prasarana di WP Priangan Timur-Pangandaran, terdiri atas:

- a) Pembangunan Jalur KA Tasikmalaya-Cijulang; Cijulang-Cipatujah-Pameungpeuk; Pameungpeuk-Cikajang; Rancabuaya – Sukabumi dan Ciwidey-Rancabuaya;
- b) Reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) Jalur KA Banjar-Pangandaran-Cijulang; Cibatugur-Garut-Cikajang;
- c) Pembangunan/ Pengembangan Stasiun/ Bangunan Operasional pada jalur Kereta Api;
- d) Pembangunan, rehabilitasi/ peningkatan dan revitalisasi sistem persinyalan, telekomunikasi, dan kelistrikan pada jalur Kereta Api;
- e) Pembangunan terminal Tipe A di Kab. Ciamis, dan Kota Banjar;

- f) Pembangunan/ Rehabilitasi terminal tipe A di Kota Tasikmalaya dan Kab. Garut;
- g) Pembangunan/ Rehabilitasi Terminal Tipe B di Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran dan Kota Tasikmalaya;
- h) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan di Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran;
- i) Pembangunan Pelabuhan/ Terminal Khusus penunjang aktivitas perekonomian;
- j) Pengembangan Pelabuhan Bojongsalawe dan Pelabuhan Majingklak di Kab. Pangandaran;
- k) Pembangunan pelabuhan sungai danau di Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, dan di Kota Banjar;
- l) Pengembangan Pangkalan Udara di Cikelet/ Pameungpeuk Kab. Garut;
- m) Optimalisasi fungsi Bandar Udara Nusawiru di Kab. Pangandaran;
- n) Rencana Pengembangan Bandar Udara Wiriadinata (Kab. Tasikmalaya);
- o) Peningkatan akses wilayah Priangan Timur menuju BIJB Kertajati; dan;
- p) Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039, disusun Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis yang mencakup kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan pola ruang kota dibagi menjadi kebijakan pengembangan kawasan lindung, kebijakan pengembangan kawasan budidaya dan kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten. Masing-masing kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam langkah-langkah

operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a) pengembangan kawasan serta pusat-pusat kegiatan yang terhirarkis dalam rangka mendukung pengembangan agrobisnis, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa;
- b) pengembangan sistem jaringan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan serta mampu melayani keseluruhan wilayah;
- c) pengembangan kawasan agrobisnis;
- d) pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
- e) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat kegiatan dan koridor- koridor jalan potensial;
- f) pengembangan pola ruang yang mengarahkan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah berdasarkan kebutuhan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya;
- g) melindungi kawasan lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- h) pendistribusian sarana pelayanan umum sesuai pengembangan sistem perkotaan.

Terhadap tujuan tersebut dalam rangka mewujudkan Kabupaten Ciamis sebagai kawasan agrobisnis dan pariwisata akan didukung melalui beberapa program dan kegiatan yang ada pada Dinas perhubungan seperti kelengkapan perlengkapan jalan dan fasilitas perhubungan disepanjang ruas jalan akses pengembangan kawasan tersebut.

Terhadap rencana pengembangan kawasan agrobisnis dan pariwisata tersebut diidentifikasi bahwa untuk urusan perhubungan rencana struktur ruang ada pada Rencana Jaringan Transportasi Darat dan Jaringan Transportasi Perkeretaapian.

Berikut disajikan hasil telaahan struktur ruang wilayah terhadap rencana jaringan transportasi.

Tabel 3.3
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW						
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Rencana jaringan transportasi							
	a. Jaringan Transportasi Darat	Pembangunan Terminal Tipe.C	Sidarahayu,			√		
			Banjarsari			√		
			Cimaragas				√	
			Kawali					√
	b. Jaringan Transportasi Perkeretaapian	Peningkatan akses terhadap layanan kereta api	Ciamis	√	√	√	√	√

2. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Tujuannya untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan.

Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip keberlanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dokumen KLHS RPJMD ini bersifat *ex-ante*, artinya memberikan masukan sebelum dokumen RPJMD disahkan, sehingga diharapkan konsep, arah, prinsip, dan usulan program yang disampaikan dalam dokumen ini dapat diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD yang sedang dibuat. Dokumen ini menggunakan 17 Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai dasar analisis dan tolak ukur tercapainya agenda pembangunan di Kabupaten Ciamis. Hal ini merupakan langkah strategis, sebagai bukti bahwa Kabupaten Ciamis berkomitmen melaksanakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Keterkaitan urusan perhubungan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis ada dalam tujuan 9 yaitu: Industri, Inovasi dan Infrastruktur (membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi). Target dari tujuan tersebut adalah mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan manusia, dengan focus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

Sesuai dengan pelayanan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan terhadap kajian lingkungan hidup strategis terdapat 3 (tiga) indikator yaitu

- a) Panjang pembangunan jalan tol
- b) Jumlah dermaga penyeberangan
- c) Jumlah pelabuhan strategis

Dari ketiga indikator tersebut untuk dokumen KLHS tahun 2019-2024 *belum dapat diukur karena data dukung tidak ada* dan perlu dilakukan survey untuk melengkapi dokumen KLHS apabila diperlukan revisi.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ruas-ruas jalan Kabupaten yang dilengkapi rambu-rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas, serta pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) yang dilengkapi dengan alat ukur pemakaian (meterisasi)
2. Kurang optimalnya integrasi dan pelayanan angkutan penumpang umum di Kabupaten Ciamis
3. Kebutuhan aplikasi lokal untuk mengakomodir angkutan konvensional dalam persaingan usaha dengan angkutan dalam jaringan (online) yang merupakan perkembangan kemajuan ilmu teknologi.
4. Penerapan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan Angkutan Umum secara elektronik, sehingga para pengusaha angkutan umum dapat meminimalisir biaya perizinan angkutan serta sistem informasi angkutan dapat diakses oleh masyarakat umum.
5. Penerapan sistem pendaftaran pengujian secara *online* dan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara *Drive Thru*.

6. Isu keselamatan jalan dan kampanye keselamatan yang masih kurang maksimal karena terhambat kurangnya SDM dan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implemtasi dari pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD-P Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, sehingga rumusan tujuan P-Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD-P Kabupaten Ciamis, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan yaitu :

1.1 Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata

2. Sasaran

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

Adapun yang menjadi sasaran yaitu :

2.1 Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik

2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah

2.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah

2.4 Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah

2.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI 2019	TARGET				
							2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata	Indeks keselamatan lalu lintas			%	89,135	93,716	93,750	95,163	96,393	96,736
			Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi	%	84,222	92,195	92,262	93,714	95,075	95,762
				Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	%	94,048	95,238	95,238	96,612	97,711	97,711
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah			Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan	Point	86,00	84,31	79,52	85,40	85,45	85,50
		Hasil Evaluasi AKIP Daerah			Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Point	71,72	73,79	71,80	71,85	71,90	71,95
Maturitas SPIP Daerah			Level	2	3	3	3	3	3
	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	Point	3	3	2,85	3	3	3
Kualitas Pelaporan Keuangan			Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan	Point	950	836	758	750	775	800

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang memuat program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada strategi daerah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan terhadap visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi		Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua		
Misi		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata	Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	Optimalisasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
				Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
				Meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
				Meningkatkan pelayanan angkutan umum
				Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Misi		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efiseian		
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Peningkatan sistem Pelayanan Publik	Peningkatan dukungan administrasi perkantoran
				Peningkatan dukungan ketercakupan sarana dan prasarana

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
		Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan	Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan	Optimalisasi penyusunan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam pencapaian tujuan dimaksud Dinas Perhubungan melaksanakan program kegiatan non urusan dan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Perhubungan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan non urusan dan urusan wajib adalah sebagai berikut :

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non Urusan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Semesteran
 3. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
 - 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - 3. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - 4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Perhubungan

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
 - 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3. Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe.C
 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe.C
 2. Pembangunan Gedung Terminal
 3. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal
 4. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)
- c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 1. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 1. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
 4. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 1. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas
 2. Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
 3. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota
- f. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
 1. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
3. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- g. Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan
 1. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
 2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan UPUBKB
 3. Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Terminal
 4. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 5. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- h. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- i. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- j. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
 2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

- k. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Daerah Kabupaten /Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
- l. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tersebut diatas merupakan program prioritas RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Selanjutnya pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program prioritas dimaksud didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan sebagai penjabaran dari rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu pendanaan sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Adapun kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Selanjutnya daftar rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 secara rinci tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2019-2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.					
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DISHUB				Point	86	84,31		79,52		85,4		85,45		85,5								
	Kualitas Pelaporan Keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DISHUB				Point	672/950	836		758		750		775		800								
	Maturitas SPIP Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP DISHUB				Point	3	3		2,85		3		3		3								
	Hasil Evaluasi AKIP Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP DISHUB				Predikat	B	BB		BB		BB		BB		BB								
				0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	%	100	100	24.162.240.240	100	27.104.101.000	100	33.029.000.000	100	28.465.000.000	100	30.604.000.000	100	143.364.341.240	Non Urusan				

				2.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan RKA perangkat daerah	%	100	100	70.500.000	100	7.500.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	138.000.000	Non Urusan	DISHUB	
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	22.738.400	6	1.500.000	6	5.000.000	6	5.000.000	30	39.238.400	Non Urusan		Kantor Dishub
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	4	42.761.600	1	4.000.000	1	5.000.000	4	5.000.000	14	61.761.600	Non Urusan		Kantor Dishub
				3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	2	1.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	16.000.000	Non Urusan		Kantor Dishub
				6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3	5.000.000	3	1.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	15	21.000.000	Non Urusan		Kantor Dishub
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	7.267.760.608	100	7.818.210.000	100	7.910.000.500	100	8.010.000.000	100	39.015.971.108	Non Urusan	DISHUB	
				1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	82	71	7.257.760.608	71	7.815.710.000	75	7.900.000.500	75	8.000.000.000	75	38.973.471.108	Non Urusan		Kantor Dishub
				5	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	1.150.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	21.150.000	Non Urusan		Kantor Dishub

				7	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	1.350.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	21.350.000	Non Urusan		Kantor Dishub		
				2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti diklat	%	0	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Non Urusan	DISHUB		
				2	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	600	300.000.000	Non Urusan		Kantor Dishub	
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	560.924.340	100	598.007.800	100	697.865.900	100	815.000.000	100	844.000.000	100	3.515.798.040	Non Urusan	DISHUB	
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	16.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	191.000.000	Non Urusan		Kantor Dishub
				2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	170.999.340	3	126.000.000	3	143.417.200	3	150.000.000	3	120.000.000	3	710.416.540	Non Urusan		Kantor Dishub
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	65.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	95.000.000	2	97.000.000	2	397.000.000	Non Urusan		Kantor Dishub
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	149.025.000	4	150.107.800	4	183.448.700	4	230.000.000	4	240.000.000	4	952.581.500	Non Urusan		Kantor Dishub
				6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	212	212	12.000.000	212	21.000.000	212	21.000.000	212	25.000.000	212	27.000.000	1060	106.000.000	Non Urusan		Kantor Dishub
				9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	147.900.000	12	200.900.000	12	250.000.000	12	260.000.000	12	300.000.000	60	1.158.800.000	Non Urusan		Kantor Dishub
				2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	100	100	53.150.000	100	43.928.200	100	269.654.100	100	330.000.000	100	2.360.000.000	100	3.056.732.300	Non Urusan	DISHUB	

				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	5	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	7	700.000.000	Non Urusan	Kantor Dishub
				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	Non Urusan	Kantor Dishub
				10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	24.000.000	2	30.000.000	2	60.000.000	10	154.000.000	Non Urusan	Kantor Dishub
				11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	5	33.150.000	8	23.928.200	17	45.654.100	40	50.000.000	40	50.000.000	125	202.732.300	Non Urusan	Kantor Dishub
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	16.019.690.292	100	18.386.455.000	100	18.742.999.500	100	18.850.000.000	100	18.900.000.000	100	90.899.144.792	Non Urusan	DISHUB
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	15.905.090.292	12	18.188.388.000	12	18.499.999.500	12	18.600.000.000	12	18.600.000.000	60	89.793.477.792	Non Urusan	Kantor Dishub
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	114.600.000	12	198.067.000	12	243.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	60	1.105.667.000	Non Urusan	Kantor Dishub
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	100	100	190.215.000	100	250.000.000	100	5.288.480.000	100	340.000.000	100	370.000.000	100	6.438.695.000	Non Urusan	DISHUB
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	29	30	110.000.000	30	200.000.000	30	231.000.000	30	240.000.000	30	250.000.000	30	1.031.000.000	Non Urusan	Kantor Dishub

				9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2000	80.215.000	1	50.000.000	1	5.057.480.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	5.407.695.000	Non Urusan	Kantor Dishub
Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata	Indeks keselamatan lalu lintas						%	89,135	93,716			93,75		95,163		96,393		96,376		96,376		
	Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi					%	84,22	92,19			92,26		93,71		95,08		95,76		95,76		
		Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi						%	94,05	95,24			95,24		96,61		97,71		97,71		97,71	
				2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					49.258.280.195		7.905.972.000		77.319.600.000		26.530.900.000		13.835.000.000		174.849.752.195		
				2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Perengkapan Jalan	%	43,51	47,71	47.945.621.995	49,14	7.345.522.000	54,2	69.110.600.000	58,75	23.510.900.000	64,97	5.730.000.000		153.642.643.995	Urusan	
						Persentase Layanan Angkutan Darat	%	69,41	63,06	1.312.658.200	63,52	560.450.000	67,37	8.209.000.000	68,76	3.020.000.000	69,02	8.105.000.000		21.207.108.200		
				2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ruas Jalan yang memiliki Perengkapan Jalan dalam kondisi baik	%	100	102,28	2.550.805.922	100	2.250.674.000	100	43.358.600.000	100	14.241.900.000	100	1.700.000.000	100	64.101.979.922	Urusan	DISHUB
				1	Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1	1	85.929.000	0	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	5	285.929.000	Urusan	Kab. Ciamis
				2	Penyediaan Perengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	328	158	1.755.008.622	158	1.567.500.000	158	42.658.600.000	1481	13.391.900.000	158	800.000.000	2113	60.173.008.622	Urusan	Kab. Ciamis
				4	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	634	500	709.868.300	500	683.174.000	500	700.000.000	500	750.000.000	500	800.000.000	2500	3.643.042.300	Urusan	Kab. Ciamis
				2.03	Pengelolaan Terminal Dalam Tipe C	Persentase Terminal Dalam Kondisi Baik	%	100	100	1.213.818.700	100	175.000.000	100	7.369.000.000	100	1.600.000.000	100	6.640.000.000	100	16.997.818.700	Urusan	DISHUB
				1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	1	300.000.000	1	350.000.000	1	370.000.000	3	1.020.000.000	Urusan	
				2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	2	6.869.000.000	0	0	1	3.000.000.000	3	9.869.000.000	Urusan	

				3	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	0	1	1.067.948.700	0	0	0	1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	2	5.067.948.700	Urusan			
				4	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	1	145.870.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	270.000.000	5	1.040.870.000	Urusan		
				2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	%	100	100	127.540.000	100	559.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	660.000.000	100	2.446.540.000	Urusan	DISHUB	
				2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	127.540.000	12	559.000.000	12	500.000.000	12	600.000.000	12	660.000.000	12	2.446.540.000	Urusan		Kab. Ciamis
				2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji	%	108,61	97,74	1.235.171.955	100	3.787.848.000	100	3.625.000.000	100	1.720.000.000	100	1.750.000.000	100	12.118.019.955	Urusan	DISHUB	
				1	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0	3	39.275.000	0	0	2	2.535.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	7	3.574.275.000	Urusan		Kab. Ciamis
				2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	3	40.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	9	140.000.000	Urusan		Kab. Ciamis
				4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	0	0	0	12800	320.000.000	16000	400.000.000	18000	450.000.000	18000	450.000.000	64800	1.620.000.000	Urusan		Kab. Ciamis
				7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	10	10	157.638.770	10	1.202.329.000	10	150.000.000	10	170.000.000	10	200.000.000	10	1.879.967.770	Urusan		Kab. Ciamis

				8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	12	12	1.038.258.185	12	2.265.519.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	12	4.903.777.185	Urusan	Kab. Ciamis
				2.06	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekamata Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Jalan Lintas yang dikelola	%	95,23	115,42	44.032.104.118	100	748.000.000	100	21.507.000.000	100	6.814.000.000	100	1.470.000.000	100	74.571.104.118	Urusan	DISHUB
				2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekamata Jalan Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Jalan Lintas	Unit	817	53	43.006.744.118	50	353.000.000	50	20.907.000.000	551	6.064.000.000	50	700.000.000	754	71.030.744.118	Urusan	Kab. Ciamis
				4	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	13.000.000	12	395.000.000	12	500.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	60	2.108.000.000	Urusan	Kab. Ciamis
				5	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4	4	1.012.360.000	0	0	4	100.000.000	4	150.000.000	4	170.000.000	4	1.432.360.000	Urusan	Kab. Ciamis
				2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0	100	120.000.000	100	135.000.000	100	150.000.000	100	405.000.000	Urusan	DISHUB
				2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	6	75.000.000	Urusan	Kab. Ciamis
				3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	0	0	0	0	0	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	36	165.000.000	Urusan	Kab. Ciamis
				4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	0	0	0	0	0	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	36	165.000.000	Urusan	Kab. Ciamis

				2.08	Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan	Persentase Unit Pelaksana Keselamatan LLAJ di Jalan yang diaudit dan diinspeksi	%	0	100	43.909.500	100	100.000.000	100	140.000.000	100	310.000.000	100	345.000.000	100	938.909.500	Urusan	DISHUB	
				1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	3	40.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	9	145.000.000	Urusan		Kab. Ciamis
				2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	0	0	0	0	0	0	2	40.000.000	2	45.000.000	4	85.000.000	Urusan		Kab. Ciamis	
				3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	0	0	0	0	0	0	6	35.000.000	6	40.000.000	12	75.000.000	Urusan		Kab. Ciamis	
				4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	0	1	43.909.500	1	100.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	5	523.909.500	Urusan		Kab. Ciamis
				5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	0	0	0	0	0	0	6	55.000.000	6	55.000.000	12	110.000.000	Urusan		Kab. Ciamis	
				2.09	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum yang beroperasi	%	84,27	71	54.930.000	100	196.450.000	100	455.000.000	100	500.000.000	100	570.000.000	100	1.776.380.000	Urusan	DISHUB	

				1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	0	0	0	0	0	650	85.000.000	650	100.000.000	650	120.000.000	650	305.000.000	Urusan	Kab. Ciamis
				2	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan dan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	54.930.000	12	196.450.000	12	370.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	60	1.471.380.000	Urusan	Kab. Ciamis
				2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang direalisasikan	%	0	0	0	0	89.000.000	100	150.000.000	100	165.000.000	100	175.000.000	100	579.000.000	Urusan	DISHUB
				1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	165.000.000	Urusan	Kab. Ciamis
				2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	165.000.000	Urusan	Kab. Ciamis
				3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1	89.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	249.000.000	Urusan	Kab. Ciamis

				2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang direalisasikan	%	0	0	0	0	0	100	0	100	75.000.000	100	100.000.000	100	175.000.000	Urusan	DISHUB	
				1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	Urusan		Kab. Ciamis
				2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	100.000.000	Urusan		Kab. Ciamis
				2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0	100	95.000.000	100	215.000.000	100	120.000.000	100	430.000.000	Urusan	DISHUB	
				1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	0	0	0	0	0	12	20.000.000	12	125.000.000	12	30.000.000	36	175.000.000	Urusan		Kab. Ciamis

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG PERHUBUNGAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD, sesuai pada table 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
Tahun 2019-2024

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	2	3	3	3	3	3	3
2	Hasil LHE AKIP Dinas Perhubungan	71,72	73,79	71,80	71,85	71,90	71,95	71,95
3	Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan	672	836	758	750	775	800	800
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan	86,00	84,31	79,52	85,40	85,45	85,50	85,50
5	Indeks keselamatan lalu lintas	89,135	93,716	93,750	95,163	96,393	96,736	96,736

A. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja utama yang disusun oleh Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks keselamatan lalu lintas			93,716	93,750	95,163	96,393	96,736	96,736
			Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi	92,195	92,262	93,714	95,075	95,762	95,762
				Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	95,238	95,238	96,612	97,711	97,71	97,711

2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan	84,31	85,35	85,40	85,45	85,50	85,50
		Hasil Evaluasi AKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil LHE AKIP Dinas Perhubungan	73,79	71,80	71,85	71,90	71,95	71,95

		Maturitas SPIP	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	3	2,85	3	3	3	3
		Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan	836	758	750	775	800	800

B. Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Tahun 2019-2024

Tabel 7.3
Target Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RJMD	Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio konektivitas Kabupaten	%	(Jumlah trayek perintis+Jumlah trayek AKAP)/Jumlah kebutuhan trayek perintis dan AKAP dalam kurun waktu tertentu*100	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	%	Survey perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	0,26	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Perhubungan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Ciamis yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Ciamis.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Perhubungan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perhubungan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Ciamis.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Perhubungan dan atau target kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Dinas

Perhubungan Kabupaten Ciamis. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ini.

Ciamis, 21 Maret 2022
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ACHMAD YANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751118 199412 1 001